

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis pertama diterima.
2. Ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis kedua diterima.
3. Umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ketiga diterima.
4. Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ke empat ditolak.
5. Diferensiasi fungsional berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ke lima diterima.
6. Spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ke enam ditolak.
7. Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ke tujuh diterima.
8. *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ke delapan diterima.

5.2 KETERBATASAN DAN SARAN

1. KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam penelitianpenelitian selanjutnya. Pertama, menggunakan periode penelitian yang pendek, hanya tahun 2016 dan 2017.

2. SARAN

Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit. Erlangga: Jakarta
- Cahyat, A. 2004. Bagaimana Kemiskinan Diukur? Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan Di Indonesia. *Governance Brief, 2004*.
- Dwirandra 2008. “Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otono Kabupaten/Kota Di Privinsi Bali Tahun 2002-2006”, Jurnal Ilmiah. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Udayana, Denpasar.
- Lesmana. Sigit I. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Naim, A., dan F. Rakhman. (2000). *Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.15: 7082.
- Peraturan Pemerintah No. 24. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta:
- Peraturan Pemerintah No. 71. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing
- Setyaningrum, D dan Syafitri, F. (2012). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Pelaporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 9, No. 2.

Suhardjanto, D dan Yulianingtyas, R. (2011). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Sebelas Maret.

Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., dan Brown, A. (2010). *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities*. Penelitian Hibah Publikasi Internasional, LP2M UNS.

Sinaga, Y. F. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemda*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Suripto, Bambang. 1999. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan*. Simposium Nasional Akuntansi II.

Simbolon, U.A.H dan Kurniawan, H.C. 2018. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Diseluruh Provinsi Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda.

Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.

- Winarna, Jaka dan Sri Murni. 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Yuliant, F. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.